

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:

MUHAMMAD SALEH ASH-SHIDDIQ

11412141040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2016

PENGESAHAN

**Skripsi yang Berjudul:
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA**

**SKRIPSI
Oleh:**

**MUHAMMAD SALEH ASH-SHIDDIQ
11412141040**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 25 November 2016 dan dinyatakan lulus

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Sukanti, M.Pd.	Ketua Penguji		19/12 2016
Moh.Djazari, M.Pd.	Sekretaris Penguji		19/12 2016
Abdullah Taman, S.E. Akt., M.Si.	Penguji Utama		19/12 2016

Yogyakarta, 20 Desember 2016
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 0023

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA**

SKRIPSI
Oleh:

MUHAMMAD SALEH ASH-SHIDDIQ
11412141040

Telah disetujui dan disahkan

Pada Tanggal 4 Oktober 2016

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta



Disetujui

Dosen Pembimbing

M.Djazari, M.Pd.

NIP: 19551215 197903 1003

Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

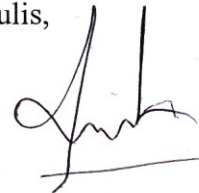
Nama : Muhammad Saleh Ash-shiddiq
NIM : 11412141040
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.1
TENTANG PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PUSKESMAS DEPOK III
SLEMAN YOGYAKARTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dapat dipaksakan.

Yogyakarta, 3 Oktober 2016

Penulis,



Muhammad Saleh Ash-shiddiq
NIM. 11412141040

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR.Ahmad, Ath-Tabrani)

“Mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya”

(Endank Soekamti)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SwT., karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah saya.

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA

Oleh:
MUHAMMAD SALEH ASH-SHIDDIQ
11412141040

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada Puskesmas Depok Sleman III Yogyakarta. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen Laporan Keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK No.1. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik Miles & Huberman. Dalam menganalisis data terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu (1) reduksi data; (2) paparan data; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian Laporan Keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan membandingkan tiga unsur, yaitu: PSAK No 1. Tentang Penyajian Laporan Keuangan, Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah menerapkan PSAK No.1 dalam Penyajian Laporan Keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan meskipun ada beberapa perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1 yaitu tidak adanya Laporan Perubahan Ekuitas karena semua ekuitas yang ada pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta merupakan milik Pemda setempat. Ada perbedaan nama Laporan Laba Rugi Komprehensif menjadi Laporan Operasional, meskipun terdapat perbedaan nama tapi informasi yang disajikan Laporan Operasional secara umum sudah menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan total surplus atau defisit Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut: Penyajian Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan telah mampu menyajikan informasi yang sesuai dengan PSAK No.1.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No.1

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PSAK No. 1 ABOUT THE
PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AT DEPOK
SLEMAN YOGYAKARTA III CLINICS**

BY:
MUHAMMAD SALEH ASH-SHIDDIQ
11412141040

ABSTRACT

This research is descriptive qualitative research conducted at health centers in Depok Sleman Yogyakarta III. This research aims to study how the application of PSAK No. 1 about the presentation of the financial statements in Depok Sleman Yogyakarta III Clinics (Operational Reports, balance sheet, cash flow statement, notes to financial statements).

The data collection method used is the documentation. In this study researchers using the technique of documentation on the financial statements of Depok Sleman Yogyakarta III Clinics to observe how the systematic presentation of the elements of financial statements that are already in compliance with PSAK No. 1. Methods of data analysis technique used was that Miles & Huberman. In analyzing the data there are three stages that have to be done, namely (1) the reduction of data; (2) the exposure data; (3) the verification conclusion and withdrawal. This research begins with comparative analysis against the subject of the research with the concept of a comparison in terms of accounting policies as well as the presentation of the financial statements, then try to adjust and compare the three elements, namely: PSAK No. 1. About the presentation of the financial statements, Permendagri No. 61 in 2007 about the technical guidelines of the Agency's financial management public service areas, and financial reports health centers in Depok Sleman Yogyakarta III by 2015.

Based on the results of the study it can be concluded that the Depok Sleman Yogyakarta III Clinics have applied PSAK No. 1 in the presentation of the financial statements in the form of Operational Reports, balance sheet, cash flow statement, and notes to financial statements even though there are some differences in the presentation of the financial statements of Depok Sleman Yogyakarta III Clinics with PSAK No. 1, namely the absence of a report of the change in Equity due to all the equity in the health centers in Depok Sleman Yogyakarta III belong to local Government. financial report of depok sleman yogyakarta III clinics contains operational reports, balance sheet, cash flow statement, and notes to financial statements has been able to present the information in accordance with PSAK No. 1.

Keywords: *financial statements, financial statement Presentation, PSAK No. 1*

KATA PENGANTAR

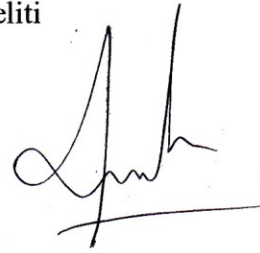
Segala puji syukur kehadiran Allah SwT., yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta” dengan baik dan lancar. Peneliti menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Prof. Sukirno, Ph.D. sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama perkuliahan.
4. M.Djazari, M.Pd. sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
5. Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA. Sebagai dosen narasumber yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi.
7. Petugas perpustakaan dan admin Program Studi Akuntansi serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
8. Pemkab Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian.
9. Kepala UPT Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dan jajarannya yang telah memberikan izin dan berpartisipasi dalam penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama menyusun skripsi.

Harapan peneliti semoga apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 3 Oktober 2016

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Muhammad Saleh Ash-shiddiq

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
LEMBAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	14
A. Kerangka Teoritis	14
1. Laporan Keuangan	14
a. Pengertian Laporan Keuangan	14
b. Komponen Laporan Keuangan	14
c. Tujuan Laporan Keuangan	19
d. Pemakai Laporan Keuangan	21
2. Penyajian Laporan Keuangan	24
3. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta	28
4. Laporan Keuangan Puskesmas Berstatus BLUD	30
a. Akuntansi pada Puskesmas Berstatus BLUD	30
b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Puskesmas Berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	30

B. Penelitian yang Relevan	31
C. Kerangka Berpikir	33
D. Paradigma Penelitian	34
E. Pertanyaan Penelitian	35
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
A. Desain Penelitian	36
B. Variabel Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 41
A. Hasil Penelitian	41
1. Profil Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta	41
2. Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta	43
3. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta	46
B. Pembahasan	50
1. Penyajian Neraca	50
2. Penyajian Laporan Operasional	51
3. Penyajian Laporan Arus Kas	52
4. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	52
5. Penerapan PSAK No.1 dalam Pelaporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta	53
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	 57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta	29
2. Perbandingan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1	40
3. Neraca Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Semester II Tahun 2015	44
4. Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Semester II Tahun 2015	44
5. Laporan Arus Kas Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Semester II Tahun 2015	46
6. Perbandingan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Paradigma Penelitian.....	34
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas-transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Memang menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif dan tidak efisien. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional, akuntabel dan transparan.

Kementerian Kesehatan sebagai salah satu badan yang ikut serta dalam mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun visi dan misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Menurut Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan status kesehatan

masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Dalam mencapai tujuannya tersebut Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum yang menjadi ujung tombak dalam kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit dari masyarakat yang kurang mampu mengeluhkan buruknya pelayanan dari rumah sakit tentang penanganan pasien, serta adanya masalah pengendalian biaya yang juga merupakan masalah kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak seperti mekanisme pasar, dan profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit tersebut.

Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah juga tidak lepas dari perkembangan masalah tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah,

sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan yang cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintah karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk masyarakat, dengan meningkatnya layanan kesehatan kepada masyarakat berdampak pada besaran pengelolaan keuangannya. Untuk mewujudkan tujuan dari Kementerian Kesehatan maka diperlukan peningkatan pelayanan publik agar dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Sesuai dengan pasal 1 angka 23 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa:

"Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas."

Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam pasal 1 angka 1 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No.23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 69 ayat (7) UU No.1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

"BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. "

Oleh karena itu pemerintah memutuskan status rumah sakit milik pemerintah menjadi Badan Layanan Umum supaya pelayanan yang diberikan rumah sakit dapat diberikan secara maksimal.

Adanya rumah sakit milik pemerintah ternyata masih perlu dibantu dengan adanya Puskesmas. Hal ini dikarenakan Puskesmas merupakan suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan pusat kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Menurut Kementrian Kesehatan RI, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja (Effendi, 2009). Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur. Puskesmas memiliki wilayah kerja yang meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi, dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas.

Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui Puskesmas yakni terwujudnya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat, Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Mutu pelayanan merupakan faktor penting yang dapat membentuk kepercayaan pasien kepada Puskesmas sehingga tercapai loyalitas mereka sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan.

Tuntutan terhadap mutu dari hari ke hari semakin tinggi. Mutu tersebut tidak hanya terdapat produk atau barang saja tetapi juga terhadap jasa yang ditawarkan oleh Puskesmas itu sendiri. Hal ini sesuai dengan BLUD seperti yang tercantum pada Permendagri No.61 Tahun 2007 yaitu untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan

oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah. Standar yang dimaksud harus tercapai syarat seperti fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat dicapai, relevan dapat diandalkan, dan tepat waktu. Adanya standar pelayanan minimal pada BLUD dapat membantu Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan sehingga dapat membantu pembangunan dalam bidang kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan mengubah status Puskesmas menjadi BLUD dapat meningkatkan pelayanan publik karena sudah adanya standar pelayanan minimal yang harus dimiliki oleh BLUD.

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah menurut Permendagri No.61 Tahun 2007 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Jadi, pada pelaksanaannya nanti BLUD diberikan keleluasaan dalam menjalankan BLUD sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Di samping itu, Puskesmas BLUD juga diberi kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Sesuai dengan Permendagri No.61 Tahun 2007 bahwa BLUD sebagai perangkat kerja pemerintah daerah mempunyai tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Segala kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum merupakan tanggungjawab Kepala Daerah. Dengan segala manfaat yang diperoleh dari merubah status menjadi BLUD.

Untuk mengubah status Puskesmas menjadi BLUD ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Yang dimaksud persyaratan substantif yaitu apabila tugas dan fungsi unit kerja tersebut bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik (*quasipublic goods*). Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, hal ini sudah termasuk bersifat operasional dalam *quasipublic goods*. Syarat berikutnya yaitu syarat teknis. Yang dimaksud dengan syarat teknis yaitu kinerja pelayanan unit kerja tersebut tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya yang mendapat

rekomendasi dari sekretaris daerah. Selain itu kinerja keuangan unit kerja tersebut juga harus dinilai sehat. karena dinilai layak dan mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Syarat berikutnya yang harus dipenuhi adalah syarat administratif, di mana Puskesmas harus menyanggupi membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategi bisnis; standar pelayanan minimal; laporan keuangan pokok; dan laporan audit terakhir dimana dokumen-dokumen tersebut nantinya juga akan dibuat oleh Puskesmas setiap tahunnya. Dengan adanya Laporan Keuangan, dapat diketahui posisi Puskesmas terkini setelah menganalisis Laporan Keuangan yang telah dibuat. Dalam akuntansi terdapat standar yang harus dipenuhi dalam pembuatan Laporan Keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna Laporan Keuangan. Jika tidak ada standar yang dibuat maka para pembuat Laporan Keuangan dapat menyajikan Laporan Keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak sendiri. Hal seperti ini dapat menimbulkan masalah bagi para pengguna Laporan Keuangan karena akan mengalami kesulitan dalam memahami Laporan Keuangan yang ada. Jika Laporan Keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta akan membingungkan para pengguna Laporan Keuangan. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia membuat sebuah standar dan pedoman dalam menyusun Laporan Keuangan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK merupakan

suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab XVII Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi: “BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.”

Sesuai dengan Permendagri No.61 maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas yang statusnya sudah menjadi BLUD adalah Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Standar pelaporan dibuat agar Laporan Keuangan Puskesmas dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

Dari penjelasan di atas mengenai Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas, Laporan Keuangan Puskesmas dan permasalahannya maka penelitian ini akan membahas tentang “*Analisis Penerapan PSAK NO.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta*”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Menurut Departemen Kesehatan RI, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Untuk itu puskesmas harus menyusun laporan atas pencapaian strategi termasuk laporan keuangannya.
2. PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu BLUD harus menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keleluasaan dalam menerapkan praktek bisnisnya yang digunakan untuk melayani masyarakat.
3. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika mengubah status puskesmas menjadi BLUD yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Berkaitan dengan persyaratan administratif, puskesmas diwajibkan membuat Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
4. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab

XVII Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi: “BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.”

C. Pembatasan Masalah

Adanya Permendagri No.61 yang mengharuskan setiap BLUD untuk membuat Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia agar mendapat hasil yang terfokus dan untuk mendalami permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Jadi penelitian ini hanya berfokus pada penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta yang penyusunan dan pembuatannya harus disesuaikan dengan PSAK No.1.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Puskesmas Depok III Sleman? (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan)”

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan

Keuangan pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan).

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak serta agar dapat menambah pemahaman tentang penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK No.1. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyelenggaraan akuntabilitas yang baik.

b. Bagi Puskesmas Depok III

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembuatan Laporan Keuangan,

menyempurnakan dan menambah keyakinan untuk penyusunan Laporan Keuangan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan akuntansi khususnya pembuatan laporan keuangan yang diperoleh selama kuliah, dan mengetahui kondisi nyata dalam tata cara pembuatan dan penyusunan Laporan Keuangan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Kerangka Teoritis

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2010: 7) Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Munawir (2004: 2) Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah informasi yang berasal dari sebuah proses akuntansi yang isinya menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

b. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012: 6) Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan atau Neraca pada akhir periode laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:
 - a) Aset tetap;
 - b) Properti investasi;

- c) Aset tidak berwujud;
- d) Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada investasi, piutang dagang, kas dan setara kas
- e) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
- f) Persediaan;
- g) Piutang dagang dan piutang lainnya;
- h) Kas dan setara kas;
- i) Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK No.58 tentang Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- j) Utang dagang dan terutang lainnya;
- k) Provisi;
- l) Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam utang dagang dan provisi;
- m) Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan PSAK No.46 tentang Pajak Penghasilan
- n) Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan PSAK No.46.
- o) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK No.58;

- p) Kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas;
dan
 - q) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
- 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif selama periode Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehen, sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama satu periode:
- a) Pendapatan
 - b) Biaya keuangan
 - c) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
 - d) Beban pajak
 - e) Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan.
 - a) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan.
 - b) Laba rugi
Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat.
 - c) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan *joint ventures* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

- d) Total laba rugi komprehensif.
 - e) Entitas mengungkapkan pos-pos dibawah ini dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai alokasi laba rugi untuk periode:
 - i) Laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk.
 - ii) Total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali dan entitas induk.
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas selama periode entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:
- a) Total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
 - b) Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif atau penyajian kembali sesuai dengan PSAK No.25.
 - c) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - (1) Laba rugi
 - (2) Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain.
 - (3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan

distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

4) Laporan Arus Kas selama periode

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna Laporan Keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam Laporan Keuangan
- c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam Laporan Keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami Laporan Keuangan.

6) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos Laporan Keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan.

- a) Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2010: 11) dalam praktiknya sifat Laporan Keuangan dibuat:

(1) Bersifat Historis

Laporan Keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang.

(2) Menyeluruh

Laporan Keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya Laporan Keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keterbatasan Laporan Keuangan menurut Kasmir (2010: 16), yaitu:

- (a) Pembuatan Laporan Keuangan disusun berdasarkan sejarah, dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
- (b) Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
- (c) Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 Laporan Keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan Laporan Keuangan entitas lain. Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan (2010: 11) terdapat 8 tujuan pembuatan atau penyusunan Laporan Keuangan yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 5) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 6) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- 7) Memberikan informasi keuangan lainnya.

Laporan Keuangan yang dibuat perusahaan perusahaan sangat bermanfaat bagi *stakeholder*. *Stakeholder* perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Laporan Keuangan yang baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Adapun menurut Sukardi dan Kurniawan (2010: 187) tujuan Laporan Keuangan yaitu:

- 1) Sebagai bahasa bisnis yang mudah dimengerti oleh semua pihak.
- 2) Menunjukkan logika hubungan timbal balik antara pos-pos dalam Laporan Keuangan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Fahmi (2011: 6) tujuan Laporan Keuangan adalah:

"Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi."

Selanjutnya menurut Fahmi (2011: 5) tujuan Laporan Keuangan adalah: "Memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter."

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan atau penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk mengetahui kinerja atau gambaran suatu perusahaan dimana informasi-informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen perusahaan, kreditor, investor, maupun pemerintah.

d. Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2010: 19) ada 5 pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yang meliputi pemilik, manajemen, kreditor, pemerintah, dan investor.

1) Pemilik

Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil Laporan Keuangan yang telah dibuat adalah:

- a) Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.

c) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

2) Manajemen

Bagi pihak manajemen Laporan Keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting Laporan Keuangan bagi manajemen:

a) Dengan Laporan Keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.

b) Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.

c) Laporan Keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

d) Laporan Keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3) Kreditor

Kepentingan pihak kreditor terhadap Laporan Keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam

menyalurkan dana pinjaman kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a) Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut. Oleh karena itu, pihak kreditor sebelum mengucurkan kreditnya terlebih dahulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dilihat dari Laporan Keuangan perusahaan yang sudah dibuat.
- b) Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.
- c) Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4) Pemerintah

Arti penting Laporan Keuangan bagi pemerintah adalah:

- a) Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b) Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil Laporan Keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara secara jujur dan adil.

5) Investor

Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor dari hasil Laporan Keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya serta perkembangan nilai saham kedepan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam penyajian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 entitas harus mampu menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

Menurut PSAK No.1 karakteristik umum dalam menyajikan Laporan Keuangan adalah:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2. Kelangsungan usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun Laporan Keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lainnya yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari (dalam membuat penilaiannya) mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun Laporan Keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan

dasar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

3. Dasar akrual

Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur Laporan Keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

4. Materialitas dan agregasi

Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material. Entitas tidak diperlukan untuk memberikan suatu pengungkapan khusus yang diminta oleh suatu PSAK jika informasi tersebut tidak material.

5. Saling hapus

Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu PSAK. Entitas melaporkan secara terpisah untuk aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi komprehensif atau laporan posisi keuangan atau dalam laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) mengurangi kemampuan

pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (misalnya, penyisihan keusangan atas persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih) tidak termasuk kategori saling hapus

6. Frekuensi pelaporan

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan Laporan Keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan Laporan Keuangan, maka entitas mengungkapkan:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek
- b. fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam Laporan Keuangan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan

7. Informasi komparatif

Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif

dari Laporan Keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

8. Konsistensi penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a. setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review atas Laporan Keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25; atau
- b. perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK.

3. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Laporan Keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan Laporan Keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis Laporan Keuangan, elemen Laporan Keuangan, tujuan Laporan Keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, kedua sektor juga memiliki persamaan yaitu keduanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat Laporan Keuangan. Siklus akuntansi pada kedua sektor tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Tabel 1. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta

NO	Laporan Keuangan Sektor Publik	Laporan Keuangan Sektor Swasta
1.	Fokus finansial dan politik	Fokus finansial
2.	Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
3.	Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
4.	Berfokus pada bagian organisasi	Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
5.	Melihat ke masa depan secara detail	Tidak dapat melihat masa depan secara detail
6.	Aturan pelaporan keuangan ditentukan oleh departemen keuangan	Aturan pelaporan keuangan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi
7.	Laporan diperiksa oleh <i>Treasury</i>	Laporan Keuangan diperiksa oleh auditor independen
8.	<i>Cash accounting</i>	<i>Acrual accounting</i>

Sumber: A.Likieman and A. Taylor, Government's New Departmental Reports, CACA (1990) dalam Henley, D. et al. (1992).

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas bahwa Laporan Keuangan lembaga pemerintah tidak berfokus pada organisasi secara keseluruhan, akan tetapi berfokus pada unit kerja pemerintah sebagai suatu bagian organisasi. Unit-unit kerja pemerintah tersebut merupakan entitas akuntansi dan entitas anggaran yang otonom. Laporan Keuangan pemerintah lebih berorientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan.

Pada sektor swasta, Laporan Keuangan perlu diaudit oleh auditor independen untuk memberikan jaminan kualitas bahwa Laporan Keuangan yang dibuat manajemen terbebas dari salah saji yang material dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Laporan Keuangan sektor publik juga perlu diaudit, namun pengauditan untuk sektor

publik tersebut lebih luas, tidak sekedar audit keuangan dan kepatuhan saja, akan tetapi harus dilakukan juga *audit value for money*.

4. Laporan Keuangan Puskesmas Berstatus Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

a. Akuntansi pada Puskesmas Berstatus BLUD

Menurut Permendagri No.61 Tahun 2007 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. Pada Permendagri No.61 pasal 116 juga tercatat bahwa BLUD harus menyelenggarakan akuntansi dan membuat Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Selain itu BLUD juga harus menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD harus menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya

b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Puskesmas Berstatus BLUD

Menurut Permendagri No.61 Laporan Keuangan BLUD terdiri dari:

- 1) Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

- a) Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - b) Laporan arus kas yang menyajikan informasikas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - c) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Keuangan.
- 2) Laporan Keuangan disertai laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil BLUD.

Laporan Keuangan yang sudah dibuat oleh BLUD nantinya akan diperiksa oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan perundang-undangan. Setiap triwulan BLUD harus menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD. Untuk Laporan Keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja harus disusun dan disampaikan tiap semester dan tahun kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan SKPD dan pemerintah daerah.

B. Penelitian yang Relevan

1. Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT.Jamsostek (Persero)

Hasil Penelitian Siti Hawa dan Siti Khairani yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) bahwa penerapan PSAK No.1 pada aset PT.Jamsostek yang dilaporkan belum memenuhi sebagian ketentuan dari PSAK No.1 untuk penyajian aset karena PT.Jamsostek lebih mendahulukan aset investasi. Untuk penerapan pada liabilitas sudah sesuai dengan PSAK No.1 karena semua hutang dan pinjaman dicantumkan ke dalam liabilitas. Berikutnya, penerapan pada ekuitas di PT. Jamsostek sudah sesuai dengan PSAK No.1 yang memiliki modal saham karena PT. Jamsostek merupakan BUMN yang sudah memiliki modal saham. Persamaan penelitian Siti Hawa dan Siti Khairani dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitian yaitu Laporan Keuangan. Selain itu jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah objek penelitian yang berupa perusahaan swasta yaitu PT.Jamsostek.

2. Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PT.Bank Sulut (Persero)

Hasil penelitian Siti Rahmi Amir dan Tresjee Runtu yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PT.Bank Sulut (Persero) mengemukakan kesimpulan Penerapan PSAK No.1 tentang penyajian laporan keuangan pada PT.Bank Sulut sudah sepenuhnya menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Paragraf-paragraf yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 yang mengharuskan melakukan

pengungkapan penyajian pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta pos-pos apa yang harus disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah dipenuhi oleh PT.Bank Sulut. Persamaan penelitian Siti Rahmi Amir dan Tresjee Runtu pada subjek penelitian yaitu Laporan Keuangan. Selain itu jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah objek penelitian yang berupa bank daerah yaitu PT.Bank Sulut (Persero).

3. Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Perum Bulog Divre Sulut Gorontalo

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marshallino Jordy Wantah yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Perum Bulog Divre Sulut Gorontalo adalah Perum Bulog Divre Sulut Gorontalo menyajikan Laporan Keuangan yang belum sesuai PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi setiap tahunnya. Persamaan penelitian Marshallino Jordy Wantah pada subjek penelitian yaitu Laporan Keuangan. Selain itu jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah objek penelitian yang berupa perusahaan umum milik negara yaitu Perum Divre Sulut Gorontalo.

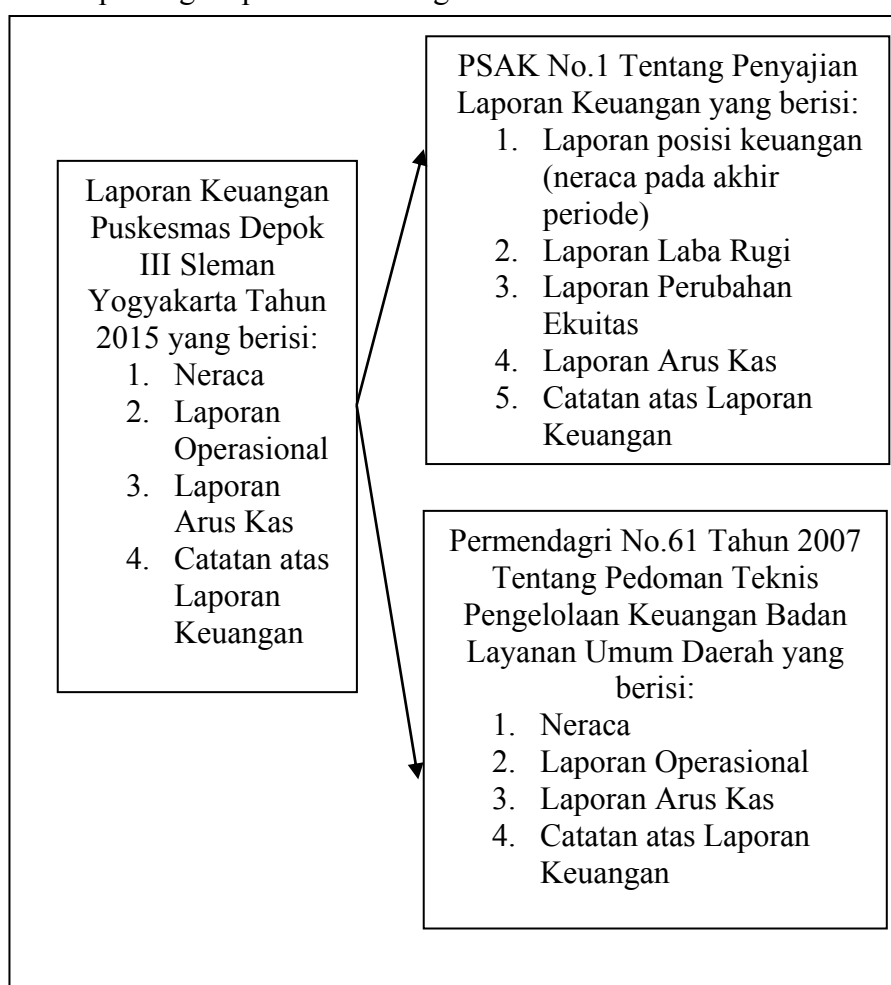
C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menganalisis penyajian Laporan Keuangan yang dilakukan Puskesmas Depok III dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.1 dan

ketentuan mengenai Badan Layanan Umum Daerah seperti: Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

D. Paradigma Penelitian

Dari penjelasan kerangka penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menganalisis penyajian Laporan Keuangan yang dilakukan Puskesmas Depok III dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum

Daerah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Menurut Permendagri No.61 Puskesmas yang berstatus BLUD diwajibkan membuat Laporan Keuangan yang berisi; neraca, laporan operasional; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat perbedaan isi Laporan Keuangan di BLUD yaitu tidak adanya pembuatan laporan laba rugi seperti yang tertulis di PSAK No.1, hal ini disebabkan karena BLUD merupakan badan pemerintah yang bersifat non profit. Untuk mengganti laporan laba rugi, Puskesmas diwajibkan membuat laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode.

E. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang dapat diambil dari kerangka berpikir di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyajian Neraca (aset, utang, modal) di Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimanakah penyajian Laporan Operasional (pendapatan, beban) Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta?
3. Bagaimanakah penyajian Laporan Arus Kas (kas masuk dan kas keluar) Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta?
4. Bagaimanakah penyajian informasi pada Catatan atas Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik pada masalah yang bersangkutan (pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah), karena terbatasnya studi atau penelitian (termasuk literatur-literatur) yang membahas mengenai pelaporan keuangan BLUD. Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan beberapa unsur yang menyangkut pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 Tentang Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

B. Variabel Penelitian

Variabel pokok pada penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan. Dalam penyajian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 entitas harus mampu menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Menurut Permendagri No.61 Puskesmas yang berstatus BLUD diwajibkan membuat Laporan Keuangan yang berisi Neraca, Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Isi Laporan Keuangan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK No.1 tentang penyajian Laporan Keuangan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini adalah Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Bungrin (2008: 121) teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalian sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif. Bahkan menurut Guba & Lincoln (2005) tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi pada Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen Laporan Keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK No.1.

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang ditemukan oleh Miles & Huberman. Menurut buku yang ditulis oleh Imam Gunawan yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dalam menganalisis data terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu (1) reduksi data; (2) paparan data; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian yang mengevaluasi Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian Laporan Keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan membandingkan antara Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Tahun 2015 dengan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Pada analisis ini akan dilakukan perbandingan apakah Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah disajikan sesuai dengan PSAK No.1 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian Laporan Keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No.1 maka penyajian akun tersebut dikatakan benar. Namun, apabila penyajian Laporan Keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No.1 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu dilakukan penyesuaian. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penyajian neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Mengidentifikasi pencatatan aset, utang, dan modal pada neraca.
3. Mengidentifikasi pencatatan pendapatan dan beban pada laporan operasional.
4. Mengidentifikasi pencatatan kas masuk dan kas keluar pada laporan arus kas.

Kemudian dibandingkan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1 maka peneliti akan membuat tabel perbandingan seperti berikut:

Tabel 2. Perbandingan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1

NO	ASPEK	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA	PSAK NO.1	SESUAI/TIDAK SESUAI
1	NERACA			
2	LAPORAN OPERASIONAL			
3	LAPORAN ARUS KAS			
4	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta

Puskesmas Depok III terletak di Jl. Kompleks Colombo No. 50A Caturtunggal Depok Sleman. Memiliki wilayah kerja 1 desa yaitu Caturtunggal, yang terdiri atas 20 padukuhan, 297 RT dan 95 RW. Luas wilayah Desa Caturtunggal adalah 889.7480 Ha.

Batas wilayah kerja menurut 4 penjuru mata angin adalah sebagai berikut:

Utara	: Desa Condongcatur Kecamatan Depok
Selatan	: Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta
Barat	: Kecamatan Mlati dan Kota Yogyakarta
Timur	: Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok

Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Depok dengan:

Desa	: 3 Km
Ibu Kota Kabupaten	: 13 Km
Ibu Kota Provinsi	: 12 Km

Jumlah penduduk dan kepala keluarga di wilayah kerja Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sebagai berikut:

Jumlah KK	: 20.129 KK
Jumlah Penduduk	: 68.375 jiwa

Jumlah penduduk Laki-Laki : 35.500 jiwa

Jumlah penduduk perempuan: 20.129 jiwa

Kegiatan utama Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pelayanan BP.Umum
2. Pelayanan BP.Gigi
3. Pelayanan KIA
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Psikologi
6. Pelayanan Laboratorium
7. Pelayanan Konsultasi Sanitasi

Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD:

Pejabat Pengelola BLUD

Pemimpin BLUD : Toto Suharto, SKM, M.Kes.

Pejabat Keuangan : Sri Soehartati

Pelaksana Teknis : Drg.Retno Hari R.M

Bendahara Pengeluaran : Agnes Yuyun Nursanti

Bendahara Penerima : Sri Partiningsih Widaningih

Dewan Pengawas BLUD

Ketua merangkap Anggota

Sekretaris Daerah : Dr.Sunartono, M.Kes.

Sekretaris merangkap Anggota

Kepala DPKAD : Drs.Samsidi, M.Si.

Asisten Sekda Bidang Pemerintah : Sunarya, SH

Asisten Sekda Bidang Pembangunan	: Dra.Suyamsih, M.Pd.
Asisten Sekda Bidang Administrasi	: Joko Handoyo, SH
Staff Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	: Drs.Dwi Supriyatno, M.Si.
Staff Ahli Bupati Ekonomi dan Keuangan Inspekturat Kab.Sleman	: Suyono, SH
Kepala Bappeda Kab.Sleman	: Drg.Intriati Y. M.Kes.
Kepala BKD	: Drg.Iswoyo Hadiwarno

2. Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta

Menurut Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, setiap BLUD diwajibkan membuat Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD harus menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Semester II Tahun 2015:

Tabel 3. Neraca Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Semester II Tahun
2015
PUSKESMAS DEPOK III
NERACA
Per 31-12-2015

URAIAN ASET	01-Jan-15	31-Dec-2015
Aset Lancar		
Kas Dan Setara Kas	Rp100.406.858	Rp150.130.717
Persediaan	Rp48.388.274	45677747
Aset Tetap		
Peralatan Dan Mesin	Rp1.876.347.450	Rp1.969.302.000
Gedung Dan Bangunan	Rp1.073.994.950	Rp1.091.994.950
Jalan, Jaringan Dan Imigrasi	Rp0	Rp31.791.666
Akumulasi Penyusutan	Rp0	(Rp1.411.602.827)
Total Aset	Rp3.099.137.532	Rp1.877.294.253
Kewajiban		
Kewajiban Jangka		
Uang Persediaan	Rp0	Rp0
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp0	Rp3.552.675
Total Kewajiban	Rp0	Rp3.552.675
Ekuitas		
Ekuitas Tidak Terikat	Rp3.099.137.532	Rp1.873.741.578
Total Ekuitas	Rp3.099.137.532	Rp1.873.741.578
Total Kewajiban Dan Ekuitas	Rp3.099.137.532	Rp1.877.294.253

Tabel 4. Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta
Semester II Tahun 2015
PUSKESMAS DEPOK III
LAPORAN OPERASIONAL
Yang Berakhir: 31-12-2015

URAIAN	01/01/2015	31-Dec-2015
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Layanan		
Pendapatan Jasa Layanan		
Pendapatan Jasa Layanan		Rp1.179.806.900
Hibah		

Hibah Tidak Terikat		
Hibah Terikat Permanen		Rp408.351.893
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain		
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain		
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain		Rp17.258.000
Anggaran Pendapatan Dan Belanja		
Apbd Kabupaten		
Operasional		Rp156.322.895
Apbn		
Apbn		Rp135.000.000
Lain-Lain Pendapatan Blud Yang Sah		
Lain-Lain Pendapatan Blud Yang Sah		
Lain-Lain Pendapatan Blud Yang Sah		Rp8.771.295
Jumlah Pendapatan		Rp1.905.510.983
Biaya		
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai		Rp149.717.000
Biaya Bahan		Rp500.801.109
Biaya Jasa Pelayanan		Rp432.905.050
Biaya Pemeliharaan		Rp14.300.000
Biaya Barang Dan Jasa		Rp9.137.689
Biaya Umum Dan Administrasi		
Biaya Pegawai		Rp106.051.900
Biaya Administrasi Kantor		Rp256.821.200
Biaya Pemeliharaan		Rp47.197.776
Biaya Barang Dan Jasa		Rp128.015.246
Biaya Penyusutan		Rp221.213.279
Biaya Umum Dan Administrasi Lainnya		Rp1.917.090
Jumlah Biaya		Rp1.868.077.339
Surplus (Defisit)		Rp37.433.643

Tabel 5. Laporan Arus Kas Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta
Semester II Tahun 2015
PUSKESMAS DEPOK III
LAPORAN ARUS KAS
Per: 31-12-2015

URAIAN	Debit	Kredit
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk		
Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan	Rp1.179.806.900	
Pendapatan APBD/APBN	Rp291.322.895	
Pendapatan Usaha Lainnya	Rp26.029.295	
Uang Persediaan		
Arus Keluar		
Biaya Layanan	Rp718.368.082	
Biaya Umum Dan Administrasi	Rp549.581.049	
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		Rp229.209.959
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar		
Perolehan Aset Tetap	Rp179.486.100	
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		(Rp179.486.100)
Jumlah Arus Kas Bersih		Rp49.723.859
Saldo Awal Kas Dan Setara Kas		Rp100.406.858
Saldo Akhir Kas Dan Setara Kas		Rp150.130.717

3. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta

Untuk melakukan perbandingan apakah Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah disajikan sesuai dengan PSAK No.1 atau masih perlu dilakukan penyesuaian dapat dilihat pada Tabel 6. sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Perbandingan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1

NO	ASPEK	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA	PSAK NO.1	SESUAI/ TIDAK SESUAI
1	NERACA	Menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas, sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan keuangan.	Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos, yaitu aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang, kas dan setara kas, aset yang dimiliki untuk dijual, utang dagang, kewajiban diestimasi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, kepentingan non pengendali, serta modal saham.	35,29% SESUAI

NO	ASPEK	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA	PSAK NO.1	SESUAI/ TIDAK SESUAI
2	LAPORAN OPERASIONAL	Laporan Operasional pada laporan keuangan Puskesmas Depok III Yogyakarta bernama Laporan Operasional. Di dalam laporan operasional juga sudah menyajikan pendapatan, biaya, dan total surplus atau defisit Puskesmas.	Laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian pos-pos pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba rugi, dan total laba rugi.	60% SESUAI
3	LAPORAN ARUS KAS	Arus kas yang disajikan telah mampu menghasilkan informasi tentang kas dan setara kas.	Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.	100% SESUAI

NO	ASPEK	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA	PSAK NO.1	SESUAI/ TIDAK SESUAI
4	CALK	Catatan atas laporan keuangan yang disajikan Puskesmas sudah mencakup dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK serta memberikan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.	Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan serta memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.	100% SESUAI

Hasil penelitian yang dapat dilihat dari Tabel 6. Di atas menunjukkan penyajian laporan keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta secara umum sudah menerapkan PSAK No.1 mulai dari penyajian Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara umum sudah sesuai seperti yang disyaratkan pada PSAK No.1 dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Menurut PSAK No.1 format Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari; Laporan posisi keuangan (neraca pada akhir periode), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta ada pergantian nama dimana Laporan Laba Rugi Komprehensif berganti nama menjadi Laporan Operasional, hal ini dikarenakan Puskesmas bukan merupakan organisasi yang bersifat nirlaba dan tidak mengenal sistem laba rugi. Untuk Laporan Perubahan Ekuitas pada penyajian Laporan Keuangan di Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta tidak dibuat, karena seluruh ekuitas yang dimiliki Puskesmas merupakan milik pemerintahan daerah.

B. Pembahasan

1. Penyajian Neraca

Menurut PSAK No.1 entitas harus menyajikan aktiva lancar terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam SAK khusus. Neraca yang disajikan minimal mencakup pos-pos berikut: aktiva berwujud, aktiva tidak

berwujud, aktiva keuangan, investasi, persediaan, piutang usaha, kas dan setara kas, utang usaha dll.

Pada penyajian Neraca Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta, aktiva lancar telah terpisah dengan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar antara lain berupa kas dan setara kas, dan persediaan. Untuk aktiva tidak lancar antara lain berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi. Untuk pencatatan kewajiban dibagi menjadi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Kewajiban jangka pendek contohnya berupa uang persediaan dari APBD Kab/Kota. Untuk pencatatan ekuitas dibagi menjadi ekuitas terikat dan ekuitas tidak terikat. Untuk ekuitas tidak terikat yang diakui adalah surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi. Menurut Permendagri No.61 Tahun 2007 ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban. Untuk penyajian pos-pos yang ada di dalam Neraca Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta juga telah sesuai dengan PSAK No. 1 diantaranya terdapat: aktiva berwujud, persediaan, utang usaha, kas dan setara kas.

Pada tabel 6. telah di tunjukkan bahwa Neraca yang disajikan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sudah sesuai sebesar 35,29% dengan PSAK No.1. Menurut PSAK No.1 Neraca harus menyajikan 17 akun, seperti: aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan, utang dagang, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas pajak sesuai PSAK

No.58, kepentingan non pengendali, dan modal saham. Pada Neraca yang disajikan dalam Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Tahun 2015 hanya terdapat 6 akun yaitu: aset tetap, aset keuangan, persediaan, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan, dan utang dagang. Jadi, kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk Neraca adalah $6/17 \times 100\% = 35,29\%$.

2. Penyajian Laporan Operasional

Menurut PSAK No.1 Laporan Laba Rugi minimal mencakup pos-pos berikut: pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, beban pajak, dll. Ada dua cara perusahaan dalam menyajikan Laporan Laba Rugi yaitu dengan metode sifat beban dan metode beban fungsional.

Pada penyajian Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta terdapat pergantian nama Laporan Laba Rugi menjadi Laporan Operasional dikarenakan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta adalah organisasi milik pemerintah yang tidak mengenal sistem laba rugi. Penyajian Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah mampu menyajikan informasi berupa jumlah pendapatan dan biaya serta dapat menunjukkan total surplus atau defisit dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Operasional yang diakui sebagai pendapatan diantaranya pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, APBD, dan APBN. Untuk jenis biaya yang diakui diantaranya biaya pelayanan (biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa) dan biaya operasional (biaya pegawai, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, dll). Untuk

penyajian Laporan Operasional menggunakan metode sifat beban, dimana beban disajikan sesuai dengan sifatnya. Untuk penyajian pos-pos yang ada di dalam Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta juga telah sesuai dengan PSAK No. 1 diantaranya terdapat: total pendapatan, total biaya, jumlah surplus atau defisit dalam suatu periode.

Pada tabel 6. telah di tunjukkan bahwa Laporan Operasional yang disajikan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sudah sesuai sebesar 60% dengan PSAK No.1. Menurut PSAK No.1 Laporan Operasional harus menyajikan 5 akun, seperti: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi, beban pajak, jumlah surplus atau defisit. Pada Laporan Operasional yang disajikan dalam Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta Tahun 2015 hanya terdapat 3 akun yaitu: pendapatan, biaya keuangan, dan jumlah surplus atau defisit. Jadi, kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk Laporan Operasional adalah $3/5 \times 100\% = 60\%$.

3. Penyajian Laporan Arus Kas

Pada tabel 6. telah di tunjukkan bahwa Laporan Arus Kas yang disajikan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sudah sesuai sebesar 100% dengan PSAK No.1 karena menurut PSAK No.1 Laporan Arus Kas harus dapat memberikan dasar bagi pengguna Laporan Keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan kas tersebut. Pada penyajian Laporan Arus Kas Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta, laporan ini telah mampu menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar serta mampu menunjukkan jumlah saldo kas dan setara

kas. Jadi, kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk Laporan Arus Kas adalah 100% karena sudah memenuhi persyaratan yang ada pada PSAK No.1 bahkan lebih lengkap dari yang disyaratkan PSAK No.1 dengan menunjukkan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi sesuai yang disyaratkan oleh PSAK No.2.

4. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Pada tabel 6. telah di tunjukkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta sudah sesuai sebesar 100% karena mampu menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta, mampu mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di dalam bagian Laporan Keuangan, dan memberikan informasi yang belum disajikan di Laporan Keuangan tapi informasi tersebut relevan untuk memahami Laporan Keuangan. Jadi, kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta untuk Catatan atas Laporan Keuangan adalah 100% karena sudah memenuhi persyaratan yang ada pada PSAK No.1

5. Penerapan PSAK No.1 dalam Pelaporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta

Sesuai dengan Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 116 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.”

BLUD sebagai instansi yang berada di lingkungan pemerintah diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk menciptakan manajemen bisnis yang sehat. Maka standar akuntansi yang mungkin digunakan dalam penyusunan pembuatan Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta adalah PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri No.61 Tahun 2007 dan Laporan Keuangan BLUD menjadi dapat lebih mudah dipahami dan memiliki relevansi.

Dengan dipergunakannya PSAK No.1 pada pelaporan keuangan BLUD maka dapat diperoleh keuntungan antara lain:

1. Meningkatnya daya banding, relevansi, serta lebih mudah dipahami para pemakai Laporan Keuangan.
2. Meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Telah memenuhi apa yang telah diatur oleh Permendagri No.61 Tahun 2007.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah mampu menerapkan PSAK No.1 dalam Penyajian Laporan Keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan meskipun ada beberapa perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No.1 yaitu tidak adanya Laporan Perubahan Ekuitas karena semua ekuitas yang ada pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta merupakan milik Pemda setempat. Ada perbedaan nama Laporan Laba Rugi Komprehensif menjadi Laporan Operasional, meskipun terdapat perbedaan nama tapi informasi yang disajikan Laporan Operasional secara umum sudah menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan total surplus atau defisit Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyajian Neraca Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 1 sebesar 35,29%.
2. Penyajian Laporan Operasional Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 1 sebesar 60%.
3. Penyajian Laporan Arus Kas Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 1 sebesar 100%.

4. Penyajian informasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 1 sebesar 100%.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Puskesmas Depok III maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dapat menjaga kualitas dan relevansi dalam pembuatan Laporan Keuangan.
2. Beberapa praktik akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK No.1 diharapkan terus konsisten supaya informasi yang dihasilkan memiliki daya banding yang tinggi.
3. Mencantumkan informasi yang lengkap dalam penyusutan setiap pos aset tetap di Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlunya pembuatan standar atau pedoman dari pemerintah yang mengatur tentang prosedur penyusunan RBA di BLUD.
5. Jika ada standar atau peraturan baru yang berlaku tentang penyajian laporan keuangan, Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta diharapkan segera memperbaiki dan memperbarui cara penyajian laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi,Irham. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: Alfabeta.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.Andi Offset
- Marshallino. (2015). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. (2002). *Metode Penelitian Bisnis Untuk: Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009). 2009. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015.
- Ronny Hendrawan. (2011). “Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus di RSUD Kota Semarang)”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.

Rulam Ahmadi. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sofyan Harahap. (2006). *Analisis Kritis Laporan Keuangan Edisi 1-5*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Siti Hawa dan Siti Khairani. (2013). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT.Jamsostek (Persero). *Jurnal*. STIE MDP.

Siti Rahmi Amir dan Treesje Runtu. (2014). “Analisis Penerapan PSAK tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PT.Bank Sulut TBK (Persero)”. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Wahyu Repi, Grace B. Mogi-Nangoi, Heince Moka. (2015). “Analisis Penerapan PSAK No.45 (Revisi 2011) Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada STIKES Muhammadiyah Manado”. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 1335/UN34.18/LT/2016

9 Juni 2016

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : **Ijin Penelitian**

**Yth . Puskesmas Depk III Sleman Yogyakarta
Komp. Colombo No. 50.A, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kec. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia**

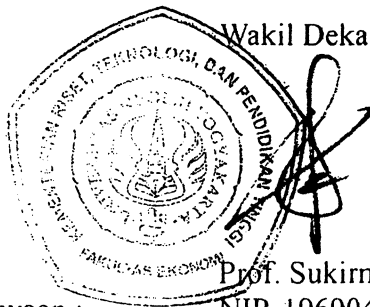
Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Saleh Ash S
NIM : 11412141040
Program Studi : Akuntansi - SI
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Puskemas Depok III Sleman Yogyakarta
Tujuan : Memohon ijin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu Penelitian : Minggu - Minggu, 12 - 26 Juni 2016

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wakil Dekan I



Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002

Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2590 / 2016

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/2480/2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 16 Juni 2016

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUHAMMAD SALEH ASH-SHIDDIQ
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11412141040
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Colombo No. 1 Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur
No. Telp / HP : 08567213355
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA
Lokasi : Puskesmas Depok 3 Depok Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 16 Juni 2016 s/d 15 September 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 16 Juni 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERIK MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman
 3. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
 4. Camat Depok
 5. Kepala UPT Puskesmas Depok 3
 6. Dekan FE - UNY
- Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN

Nomor.: 070/0472

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : Toto Suharto, SKM, M.Kes
- b. Jabatan : Kepala UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat Depok 3

dengan ini menerangkan bahwa:

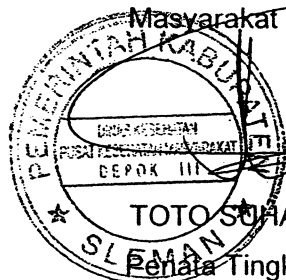
- a. Nama : Muhammad Saleh Ash-Shiddiq
- b. NIM : 11412141040
- c. Program/tingkat : S1 Akuntansi
- d. Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan uji penelitian dengan judul "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PUSKESMAS DEPOK III SLEMAN YOGYAKARTA" pada tanggal 20 Juni 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sleman, 21 Juni 2016

Kepala UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Depok 3



TOTO SUHARTO, S.KM, M.Kes
Penata Tingkat I, III/d

NIP 19680512 198903 1 015

LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2015
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SLEMAN

2015

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



Puskesmas Depok III

NERACA

PER : 30-06-2015

Uraian

31-Jan-2015

30-Jun-2015

ASET

ASET LANCAR

KAS DAN SETARA KAS

1110103	Kas di Bank	72,300,101	312,399,455
1110109	Kas/Bank Bendahara APBD	0	92,341
1110201	Kas Di Bendahara Penerima	0	0
1110301	Kas Di Bend Pengeluaran	28,106,757	241,025

PERSEDIAAN

1150101	Persediaan Obat-Obatan	43,178,874	27,311,917
1150102	persediaan alat dan bahan medis	380,000	0
1150207	BHP Laboratorium	40,000	1,643,451
1150501	ATK	531,900	1,719,450
1150601	Persediaan Bahan Cetakan Buku	2,699,500	12,003,100
1150805	Persediaan Alat Listrik Lainnya	350,000	50,000
1150903	Persediaan Bahan Kebersihan Lainnya	1,208,000	5,966,600

ASET TETAP

PERALATAN DAN MESIN

1320102	Alat-alat besar	9,200,000	9,200,000
1320103	Alat-alat angkutan	719,374,000	719,374,000
1320105	Alat-alat pertanian / peternakan	22,381,150	22,381,150
1320106	Alat-alat kantor dan rumah tangga	327,150,991	410,533,931
1320107	Alat-alat studio dan komunikasi	10,900,000	15,400,000
1320108	Alat-alat kedokteran	385,760,869	385,876,558
1320109	Alat laboratorium	321,969,500	325,854,500
1320110	Alat-alat keamanan	2,430,000	2,430,000
1321609	Lain-Lain Peralatan Rumah Tangga	77,180,940	0

GEDUNG DAN BANGUNAN

1330101	Gedung Dan Bangunan	1,001,870,950	1,010,870,950
1330102	Gedung Dan Bangunan Rumah Dinas	72,124,000	72,124,000

JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

1340106	Instalasi Telepon	0	31,791,666
---------	-------------------	---	------------

Total ASET

3,099,137,532

3,367,264,094

KEWAJIBAN

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
UANG PERSEDIAAN**

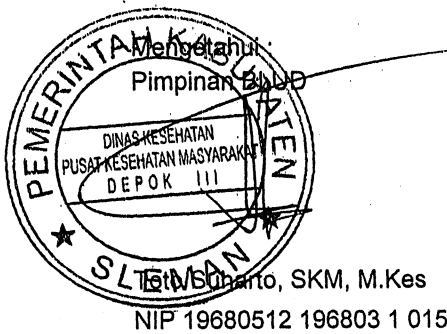
2120101	Uang Persediaan Dari APBD Kab/Kota	0	92,341
	Total KEWAJIBAN	0	92,341

EKUITAS

EKUITAS

EKUITAS TIDAK TERIKAT

3110101	Ekuitas Awal	2,135,393,260	2,135,393,260
3110102	Surplus Dan Defisit Tahun Lalu	227,881,802	561,463,633
3110103	Surplus Dan Defisit Tahun Berjalan	333,581,831	268,034,221
3110104	Ekuitas Donasi	402,280,639	402,280,639
	Total EKUITAS	3,099,137,532	3,367,171,753
	Total KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,099,137,532	3,367,264,094



Sleman, 31 Juli 2015
Pejabat Keuangan

Sri Soehartati, SIP
NIP 19650108 199003 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

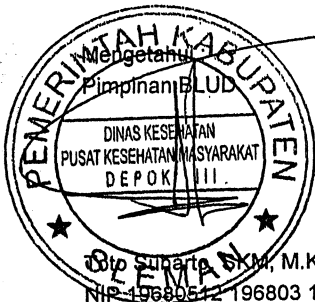


Puskesmas Depok III

LAPORAN OPERASIONAL

Yang Berakhir: 30-06-2015

URAIAN	01/01/2015	30-Jun-2015
PENDAPATAN		
PENDAPATAN JASA LAYANAN		
PENDAPATAN JASA LAYANAN		
Pendapatan Jasa Layanan		573,096,000.00
HIBAH		
HIBAH TIDAK TERIKAT		
Hibah Terikat Permanen		196,921,015.00
HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN		
HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN		
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain		11,581,500.00
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA		
APBD Kabupaten		
Operasional		74,650,659.00
APBN		
APBN		49,919,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH		
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH		
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah		3,691,854.00
Jumlah PENDAPATAN		909,860,028.00
BIAYA		
BIAYA OPERASIONAL		
BIAYA PELAYANAN		
Biaya Pegawai		53,664,300.00
Biaya Bahan		196,542,246.00
Biaya Jasa Pelayanan		184,960,022.00
Biaya Pemeliharaan		3,469,000.00
Biaya Barang dan Jasa		2,984,500.00
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		
Biaya Pegawai		45,119,050.00
Biaya Administrasi Kantor		100,218,300.00
Biaya Pemeliharaan		14,466,324.00
Biaya Barang dan Jasa		40,402,065.00
Jumlah BIAYA		641,825,807.00
Surplus (Defisit)		268,034,221.00



Sri Soehartati, SKM, M.Kes
NIP. 19680512 196803 1 015

Sleman, 31 Juli 2015
Pejabat Keuangan

Sri Soehartati, SIP
NIP 19650108 199003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Puskesmas Depok III
LAPORAN ARUS KAS

PER : 30-06-2015

URAIAN

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk

Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan	573,096,000
Pendapatan APBD/APBN	124,569,659
Pendapatan Usaha Lainnya	15,273,354
Uang Persediaan	92,341

Arus Keluar

Biaya Layanan	265,847,902
Biaya Umum dan Administrasi	215,155,489

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 232,027,963

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar

Perolehan Aset Tetap	19,702,000
----------------------	------------

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (19,702,000)

Jumlah Arus Kas Bersih 212,325,963

Saldo Awal Kas dan Setara Kas 100,406,858

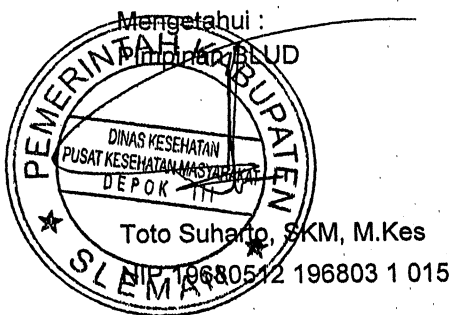
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 312,732,821

Sleman, 31 Juli 2015

Pejabat Keuangan

Sri Soehartati, SIP

NIP 19650108 199003 2 006



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendahuluan

a. Sejarah pembentukan BLUD;

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, lembaga-lembaga pelayanan sosial milik pemerintah baik di Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengubah statusnya dari Lembaga Birokratis menjadi Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan badan yang memiliki otonomi atau semi otonomi dalam pengelolaan keuangannya. Dalam peraturan pemerintah tersebut, Puskesmas dapat diklasifikasikan sebagai Lembaga Usaha Non Profit, dengan demikian prinsip efisiensi dan produktifitas harus menjadi bagian dari social management. Hal inilah yang nantinya dapat dijadikan starting point untuk meningkatkan social management di Puskesmas.

Pada masa sekarang ini sangat sulit untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai pelanggan / pemakai jasa pelayanan Puskesmas, hal ini terlihat dengan semakin maraknya tuntutan sosial terhadap Puskesmas, dokter maupun tenaga profesional lain di Puskesmas. Aturan yang ada kadangkala menimbulkan kekakuan dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas. Menurunnya kemampuan dana pemerintah dalam penganggaran, memacu Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis untuk mencari jalan keluar. Untuk itu berbagai upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu terus dilakukan. Salah satu langkah strategis yang harus ditempuh dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah dengan secara aktif meningkatkan kinerja organisasi Puskesmas secara profesional dan mandiri.

b. Dasar hukum pembentukan BLUD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD

Permendagri N0.24 Tahun 2005 Tentang Atandar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Bupati N0.20 Tahun 2008 Tentang Pendapatan Daerah semua pendapatan yang diterima Puskesmas di setor ke Kas Daerah dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Alamat kantor BLUD, unit vertikal BLUD, dan unit usaha BLUD;

Kompleks Colombo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama BLUD;

1 Pelayanan BP.Umum

2 Pelayanan BP.Gigi

3 Pelayanan KIA

4 Pelayanan Gizi

5 Pelayanan Psikologi

6 Pelayanan Laboratorium

7 Pelayanan Konsultasi Sanitasi

e. Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD;

Pejabat Pengelola BLUD

Pemimpin BLUD

: Toto Suharto, SKM, M.Kes

Pejabat Keuangan

: Sri Soehartati

Pelaksana Teknis

: drg.Retno Hari R.M

: Setyowati

Bendahara Pengeluaran

: Agnes Yuyun Nursanti

Bendahara penerima

: Sri Partiningsih Widaningih

Dewan Pengawas BLUD

Ketua merangkap Anggota

2. Sekretaris Daerah

: dr.Sunartono,M.Kes.

Sekretaris merangkap anggota

Kepala DPKAD

: Drs.Samsidi,M.Si

Anggota :

Asisten Sekda bidang Pemerintah

: Sunarya, SH

Asisten Sekda bidang pembangunan

: Dra.Suyamsih,M.Pd

Asisten Sekda bidang Administrasi

: Joko Handoyo,SH

Staff Ahli Bupati Bidang Kemasy &SDM

: Drs.Dwi Supriyatno,M.Si

Staff Ahli Bupati Ekonomi &Keu

Inspekturat Kabupaten Sleman

: Suyono,SH

Kepala Bappeda Kabupaten Sleman

: drg.Intriati Y.M.Kes

Kepala BKD

: Drs.Iswoyo Hadiwarno

f. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

Jumlah pegawai 32 Orang PNS

Jumlah pegawai 7 Orang non PNS

Kebijakan Akuntansi

1) Asumsi Dasar

Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi Puskesmas Depok 3 adalah sebagai berikut:

(1) Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi Puskesmas Depok 3 akan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk menghentikan usahanya.

(2) Dasar Akuntansi Akrua

Laporan keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

Namun demikian untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Puskesmas Depok 3 mengacu kepada dasar akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Sleman yang menggunakan dasar kas, yaitu mengakui pendapatan daerah pada saat kas diterima dan belanja daerah diakui pada saat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Entitas Akuntansi

Puskesmas Depok 3 adalah instansi dilindungi Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor : 52 tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas, dengan tugas melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(4) Ciri Dasar Akuntansi

Akuntansi keuangan Puskesmas Depok 3 merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, karena kekayaan Puskesmas Depok 3 bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan Puskesmas Depok 3 menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya dilindungi Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu :

- a. Dalam rangka pengelolaan kas Puskesmas Depok 3 dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. Puskesmas juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.
- b. Puskesmas Depok 3 diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan puskesmas.
- c. Akuntansi dan Laporan Keuangan Puskesmas Depok 3 diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI.
- d. Pada saat konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, laporan keuangan Puskesmas Depok 3 disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2) Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset lancar terdiri atas : kas dan bank, deposito, piutang, persediaan, belanja dibayar dimuka.

Aset tetap adalah Aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pelayanan publik dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi

Aset lain-lain adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset tetap dan dana cadangan.

3). Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dilunasi

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul

4). Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Kewajiban. Ekuitas terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan.

5). Kebijakan Akuntansi Hibah Terikat

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan untuk pembiayaan operasional tertentu misalnya Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan perolehan Aset tetap, misalnya pendonor menyumbangkan dana tetapi khusus untuk membeli Aset tertentu, maka dicatat pada Neraca Dana Hibah Terikat

6). Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan Aset dan atau penurunan Kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu

Pendapatan diakui pada saat kejadian (transaksi) bukan pada saat kas atau setara kas diterima dan dicatat dalam periode bersangkutan sebesar jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

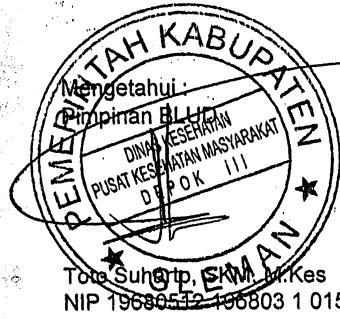
Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

Penerimaan berasal dari APBN dan APBD yang digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat diakui sebagai Pendapatan Jasa Layanan.

7). Kebijakan Akuntansi Biaya

Berdasarkan sumber dananya biaya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya yang sumber dananya dari pendapatan operasional rumah sakit dan biaya yang sumber dananya berasal dari alokasi dana pemerintah Kabupaten.

Biaya terdiri dari: biaya operasional dan biaya non operasional sedangkan biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan dan biaya administrasi dan umum



Sleman, 31 Juli 2015
Pejabat Keuangan

Sri Soehartati, SIP
NIP 19650108 199003 2 006

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1) Penjelasan atas pos-pos neraca;

(1) Aset

a. Kas dan setara kas;	Rp	312,732,821
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 30 Juni 2015 terdiri dari:		
- Kas di Bendahara	Rp	241,025
- Kas di rekening Bank	Rp	312,399,455
- Kas/ Bank Bendahara APBD	Rp	92,341
	Jumlah Rp	<u>312,732,821</u>
b. Investasi jangka pendek	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek berupa kas dan setara kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2015		
c. Piutang usaha;	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Usaha per 30 Juni 2015		
d. Piutang Lain	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain per 30 Juni 2015 berupa		
e. Persediaan	Rp	48,694,518
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Obat per 30 Juni 2015		
Persediaan ATK		1,719,450
Persediaan cetakan		12,003,100
Persediaan bahan laboratorium		1,643,451
Persediaan alat & bahan medis		0
Persediaan bahan & peralatan kebersihan		5,966,600
Persediaan alat listrik , eletronika , dll		50,000
Persediaan obat farmasi		27,311,917
	Jumlah Rp	<u>48,694,518</u>
f. Uang Muka	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Muka per 30 Juni 2015		
e. Biaya dibayar di muka.	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan saldo Biaya dibayar di muka per 30 Juni 2015		
f. Aset tetap,	Rp	3,005,836,755
Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap per 30 Juni 2015, terdiri atas :		
- Tanah;	Rp	0
- Gedung dan bangunan;	Rp	1,082,994,950
- Peralatan dan mesin;	Rp	1,891,050,139
- Jalan, irigasi, dan jaringan;	Rp	31,791,666
- Aset tetap lainnya;	Rp	0
- Konstruksi dalam pengerjaan.	Rp	0
	Jumlah Rp	<u>3,005,836,755</u>
g. Aset lainnya	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan Aset Lainnya per 30 Juni 2015, terdiri atas :		
- aset kerja sama operasi	Rp	0
- aset sewa guna usaha;	Rp	0
- aset tak berwujud;	Rp	0
- aset lain-lain.	Rp	0
	Jumlah Rp	<u>0</u>

(2) Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek	Rp	92,341
Jumlah tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2015, terdiri atas :		
- utang usaha;	Rp	0
- utang pajak;	Rp	0
- biaya yang masih harus dibayar;	Rp	0
- pendapatan diterima di muka	Rp	0
- bagian lancar utang jangka panjang;	Rp	0
- utang Bunga	Rp	0
- utang jangka pendek lainnya	Rp	0
- Uang persediaan dari APBD Kab / kota	Rp	92,341
Jumlah	Rp	<u>92,341</u>

Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan Kewajiban Jangka Panjang per 30 Juni 2015		

(3) Ekuitas

Ekuitas BLUD diklasifikasikan menjadi:

a. Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas:

- ekuitas awal	Rp	2,135,393,260
- surplus & defisit tahun lalu;	Rp	561,463,633
- surplus & defisit tahun berjalan;	Rp	268,034,221
- ekuitas donasi;	Rp	402,280,639

b. Ekuitas Terikat

- Ekuitas Terikat Temporer	Rp	0
- Ekuitas Terikat Permanen	Rp	0
Jumlah	Rp	<u>3,367,171,753</u>

2) Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional;

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan terdiri dari :

a. Pendapatan

a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Rp	573,096,000
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan Usaha dari Jasa Layanan per 30 Juni 2015 yang terdiri dari:		
- Pendptan Pasien Umum Rawat Jalan	Rp	573,096,000
- Pendapatan Pasien Umum Rawat Inap	Rp	
- Pendapatan Pasien Askes Rawat Inap	Rp	
- Pendapatan Kapitasi Askes	Rp	
Jumlah	Rp	<u>573,096,000</u>
b) Hibah terikat dan tidak terikat;	Rp	196,921,015
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan hibah per 30 Juni 2015		
c) Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	15,273,354
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan Usaha Lainnya per 30 Juni 2015 yang terdiri dari:		
Pendapatan PKL	Rp	11,581,500
Pendapatan Bunga Bank	Rp	1,566,854
Pendapatan Lainnya	Rp	2,125,000
Jumlah	Rp	<u>15,273,354</u>
d) Pendapatan dari APBN/APBD	Rp	124,569,659
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan dari APBN/APBD per 30 Juni 2015		

b. Biaya

a) Biaya Pelayanan

Jumlah tersebut merupakan Biaya Pelayanan per 30 Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya pegawai	Rp	53,664,300
Honorarium dokter	21,740,400	
Honorarium psikolog	14,388,900	
Honorarium fogging	5,040,000	
Uang saku / transport PNS	12,495,000	
	<u>53,664,300</u>	

- Biaya bahan	Rp	196,542,246
BHP Medis	0	
Bahan dan obat-obatan	177,455,697	
Bahan dan alat laboratorium	10,476,549	
Bahan makanan pokok	980,000	
Belanja tambahan makanan dan vitamin	7,630,000	
	<u>196,542,246</u>	

- Biaya Jasa Layanan	Rp	184,960,022
Biaya Jasa Pelayanan - PNS	167,279,397	
Biaya Jasa Pelayanan - non PNS	17,680,625	
	<u>184,960,022</u>	

- Biaya Pemeliharaan	Rp	3,469,000
Biaya pemeliharaan alat kedokteran	660,000	
Biaya pemeliharaan alat laboratorium	979,000	
Biaya uji kalibrasi	1,380,000	
Biaya pemeliharaan alat mesin fogging	450,000	
	<u>3,469,000</u>	

- Biaya Barang dan Jasa	Rp	2,984,500
Biaya perawatan dan pengobatan	375,000	
Biaya jasa uji pemeriksaan laboratorium luar	2,609,500	
	<u>2,984,500</u>	

- Biaya Penyusutan/ Depresiasi	Rp	0
- Biaya Pelayanan Lainnya	Rp	0

Jumlah Rp 441,620,068

b) Biaya Umum dan Administrasi

Jumlah tersebut merupakan biaya Umum dan Administrasi per 30 Juni 2015

- biaya pegawai	Rp	44,519,050
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,675,000	
Honorarium akuntan	8,714,700	
Honorarium IT dan pengelola aset	4,357,350	
Honorarium cleaning service	7,008,000	
Honorarium sopir	6,864,000	
Honorarium jaga malam	7,200,000	
Uang saku / transport PNS	350,000	
Honorarium instruktur senam	1,350,000	
	<u>44,519,050</u>	

- biaya admin perkantoran;	Rp	100,218,300
Biaya alat tulis kantor	4,734,450	
Biaya cetak	4,633,400	
Biaya penggandaan (fotocopy)	6,903,450	
Biaya perangko , materai , benda pos lainnya	780,000	
Biaya makanan dan minuman harian pegawai	3,520,000	
Biaya makanan dan minuman rapat	37,519,500	
Biaya makanan dan minuman tamu	822,500	
Biaya perjalanan dinas dalam daerah	6,620,000	
Biaya kursus2 singkat / pelatihan	11,375,000	
Biaya transportasi dan akomodasi	23,310,000	
	<u>100,218,300</u>	

- biaya pemeliharaan	Rp	14,466,324
Biaya pemeliharaan alat angkutan darat bermotor	4,191,324	
Biaya pemeliharaan AC	3,200,000	
Biaya pemeliharaan gedung - bangunan	1,575,000	
Biaya pemeliharaan komputer	3,300,000	
Biaya pemeliharaan - jaringan air	2,000,000	
Biaya pemeliharaan genset	200,000	
	<u>14,466,324</u>	

- biaya barang dan jasa;	Rp	40,402,065
Biaya alat listrik dan elektronik	3,098,000	
Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,898,900	
Biaya bahan bakar minyak	13,457,000	
Biaya telepon	1,710,356	
Biaya listrik	15,076,800	
Biaya surat kabar / majalah	325,000	
Biaya penghias ruangan	325,000	
Biaya jasa uji - pemeriksaan limbah medis	2,503,009	
Biaya pengisian gas / galon	408,000	
Biaya jasa angkut sampah	600,000	
	<u>40,402,065</u>	

- biaya promosi	Rp	0
- biaya Depresiasi/Penyusutan	Rp	0
- biaya Administrasi Lainnya	Rp	0
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>199,605,739</u>

c) Pendapatan dan Biaya Non Operasional	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan pendapatan dan biaya non operasional per 30 Juni 2015 terdiri atas		
- Pendapatan Non Operasional	Rp	0
- Biaya Non Operasional	Rp	0
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>0</u>

3) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;

Komponen-komponen pelaporan arus kas terdiri dari

(1). Arus kas dari aktivitas operasi, terdiri atas:

Arus kas masuk	Rp	713,031,354
Pendapatan Jasa Layanan	573,096,000	
Pendapatan APBD / APBN	124,569,659	
Pendapatan usaha lainnya	15,273,354	
Uang persediaan	92,341	
	<u>713,031,354</u>	

Arus kas keluar	Rp	481,003,391
Biaya Pelayanan	265,847,902	
Biaya Administrasi dan Umum	215,155,489	
	<u>481,003,391</u>	

Arus kas bersih Rp 232,027,963

(2). Arus kas dari aktivitas investasi, terdiri atas:

Arus kas masuk	Rp	0
Arus kas keluar	Rp	19,702,000
Perolehan aset tetap		

Arus kas bersih Rp -19,702,000

(3). Arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri atas:

Arus kas masuk	Rp	0
Arus kas keluar	Rp	0
Arus kas bersih	<u>Rp</u>	<u>0</u>

4) Informasi Tambahan

BLUD mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Mengetahui
Pimpinan BLUD



Toto Suharto, SKM, M.Kes
NIP 19680512-196803 1 015

Sleman, 31 Juli 2015
Pejabat Keuangan



Sri Soehartati, SIP
NIP 19650108 199003 2 006

LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK III
SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2015
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SLEMAN

2015

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



Puskesmas Depok III

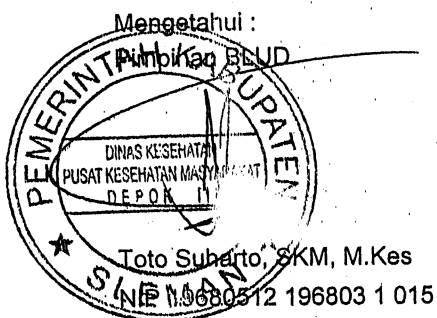
NERACA

PER : 31-12-2015

Uraian	1-Jan-2015	31-Dec-2015
ASET		
ASET LANCAR		
KAS DAN SETARA KAS	100,406,858.00	150,130,717.00
PERSEDIAAN	48,388,274.00	45,677,747.00
ASET TETAP		
PERALATAN DAN MESIN	1,876,347,450.00	1,969,302,000.00
GEDUNG DAN BANGUNAN	1,073,994,950.00	1,091,994,950.00
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0.00	31,791,666.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	0.00	-1,411,602,827.00
Total ASET	3,099,137,532.00	1,877,294,253.00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA		
UANG PERSEDIAAN	0.00	0.00
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0.00	3,552,675.00
Total KEWAJIBAN	0.00	3,552,675.00
EKUITAS		
EKUITAS		
EKUITAS TIDAK TERIKAT	3,099,137,532.00	1,873,741,578.00
Total EKUITAS	3,099,137,532.00	1,873,741,578.00
Total KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,099,137,532.00	1,877,294,253.00

Sleman, 29 Februari 2016
Pejabat Keuangan

Sri Soehartati, SIP
NIP 19650108 199003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



Puskesmas Depok III
LAPORAN OPERASIONAL
 Yang Berakhir: 31-12-2015

URAIAN	01/01/2015	31-Dec-2015
PENDAPATAN		
PENDAPATAN JASA LAYANAN		
PENDAPATAN JASA LAYANAN		
Pendapatan Jasa Layanan		1,179,806,900.00
HIBAH		
HIBAH TIDAK TERIKAT		
Hibah Terikat Permanen		408,351,893.00
HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN		
HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN		
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain		17,258,000.00
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA		
APBD Kabupaten		
Operasional		156,322,895.00
APBN		
APBN		135,000,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH		
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH		
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah		8,771,295.00
Jumlah PENDAPATAN		1,905,510,983.00
BIAYA		
BIAYA OPERASIONAL		
BIAYA PELAYANAN		
Biaya Pegawai		149,717,000.00
Biaya Bahan		500,801,109.00
Biaya Jasa Pelayanan		432,905,050.00
Biaya Pemeliharaan.		14,300,000.00
Biaya Barang dan Jasa		9,137,689.00
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		
Biaya Pegawai:		106,051,900.00
Biaya Administrasi Kantor		256,821,200.00
Biaya Pemeliharaan		47,197,776.00
Biaya Barang dan Jasa.		128,015,246.00
Biaya Penyusutan.		221,213,279.00
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		1,917,090.00
Jumlah BIAYA		1,868,077,339.00
Surplus (Defisit)		37,433,644.00



Loke, Sunarto, SKM, M.Kes
 NIP 19680512 196803 1 015

Sleman, 29 Februari 2016
 Pejabat Keuangan

Sri Soehartati, SIP
 NIP 19650108 199003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Puskesmas Depok III

LAPORAN ARUS KAS

PER : 31-12-2015

URAIAN

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk

Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan	1,179,806,900
Pendapatan APBD/APBN	291,322,895
Pendapatan Usaha Lainnya	26,029,295
Uang Persediaan	0

Arus Keluar

Biaya Layanan	718,368,082
Biaya Umum dan Administrasi	549,581,049

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 229,209,959

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar

Perolehan Aset Tetap	179,486,100
----------------------	-------------

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (179,486,100)

Jumlah Arus Kas Bersih 49,723,859

Saldo Awal Kas dan Setara Kas 100,406,858

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 150,130,717

Sleman, 29 Februari 2016

Pejabat Keuangan

Sri Soehartati, SIP

NIP 19650108 199003 2 006

Mengetahui :

Pimpinan BLUD



Fitri Surtanto, SKM, M.Kes

NIP 19680512 196803 1 015

Pendahuluan

- a. Sejarah pembentukan BLUD;
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, lembaga-lembaga pelayanan sosial milik pemerintah baik di Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengubah statusnya dari Lembaga Birokratis menjadi Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan badan yang memiliki otonomi atau semi otonomi dalam pengelolaan keuangannya. Dalam peraturan pemerintah tersebut, Puskesmas dapat diklasifikasikan sebagai Lembaga Usaha Non Profit, dengan demikian prinsip efisiensi dan produktifitas harus menjadi bagian dari social management. Hal inilah yang nantinya dapat dijadikan starting point untuk meningkatkan social management di Puskesmas.
- Pada masa sekarang ini sangat sulit untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai pelanggan / pemakai jasa pelayanan Puskesmas, hal ini terlihat dengan semakin maraknya tuntutan sosial terhadap Puskesmas, dokter maupun tenaga professional lain di Puskesmas. Aturan yang ada kadangkala menimbulkan kekakuan dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas. Menurunnya kemampuan dana pemerintah dalam penganggaran, memacu Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis untuk mencari jalan keluar. Untuk itu berbagai upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu terus dilakukan. Salah satu langkah strategis yang harus ditempuh dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah dengan secara aktif meningkatkan kinerja organisasi Puskesmas secara profesional dan mandiri.
- b. Dasar hukum pembentukan BLUD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
Permendagri N0.24 Tahun 2005 Tentang Atandar Akuntansi Pemerintah
Berdasarkan Peraturan Bupati N0.20 Tahun 2008 Tentang Pendapatan Daerah semua pendapatan yang diterima Puskesmas di setor ke Kas Daerah dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati.
- c. Alamat kantor BLUD, unit vertikal BLUD, dan unit usaha BLUD;
Kompleks Colombo, Caturtunggal , Depok, Sleman, Yogyakarta
- d. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama BLUD;
- 1 Pelayanan BP.Umum
 - 2 Pelayanan BP.Gigi
 - 3 Pelayanan KIA
 - 4 Pelayanan Gizi
 - 5 Pelayanan Psikologi
 - 6 Pelayanan Laboratorium
 - 7 Pelayanan Konsultasi Sanitasi
- e. Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD;
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Pejabat Pengelola BLUD | |
| Pemimpin BLUD | : Toto Suharto, SKM, M.Kes |
| Pejabat Keuangan | : Sri Soehartati |
| Pelaksana Teknis | : drg.Retno Hari R.M
: Setyowati |
| Bendahara Pengeluaran | : Agnes Yuyun Nursanti |
| Bendahara penerima | : Sri Partiningsih Widaningih |
| Dewan Pengawas BLUD | |
| Ketua merangkap Anggota | |
| Sekretaris Daerah | : dr.Sunartono,M.Kes. |
| Sekretaris merangkap anggota | |
| Kepala DPKAD | : Drs.Samsidi,M.Si |
| Anggota : | |
| Asisten Sekda bidang Pemerintah | : Sunarya, SH |
| Asisten Sekda bidang pembangunan | : Dra.Suyamsih,M.Pd |
| Asisten Sekda bidang Administrasi | : Joko Handoyo,SH |
| Staff Ahli Bupati Bidang Kemasy &SDM | : Drs.Dwi Supriyatno,M.Si |
| Staff Ahli Bupati Ekonomi &Keu | |
| Inspekturat Kabupaten Sleman | : Suyono,SH |
| Kepala Bappeda Kabupaten Sleman | : drg.Intriati Y.M.Kes |
| Kepala BKD | : Drs.Iswoyo Hadiwarno |
- f. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.
Jumlah pegawai 32 Orang PNS
Jumlah pegawai 7 Orang non PNS

1) Asumsi Dasar

Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi Puskesmas Depok 3 adalah sebagai berikut:

(1) Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi Puskesmas Depok 3 akan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk menghentikan usahanya.

(2) Dasar Akuntansi Akrua

Laporan keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

Namun demikian untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Puskesmas Depok 3 mengacu kepada dasar akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Sleman yang menggunakan dasar kas, yaitu mengakui pendapatan daerah pada saat kas diterima dan belanja daerah diakui pada saat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Entitas Akuntansi

Puskesmas Depok 3 adalah instansi dilindungi Pemerintah Kabupaten Sleman yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor : 52 tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas, dengan tugas melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(4) Ciri Dasar Akuntansi

Akuntansi keuangan Puskesmas Depok 3 merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, karena kekayaan Puskesmas Depok 3 bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan Puskesmas Depok 3 menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya dilindungi Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu :

- a. Dalam rangka pengelolaan kas Puskesmas Depok 3 dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. Puskesmas juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.
- b. Puskesmas Depok 3 diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan puskesmas.
- c. Akuntansi dan Laporan Keuangan Puskesmas Depok 3 diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI.
- d. Pada saat konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, laporan keuangan Puskesmas Depok 3 disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2) Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset lancar terdiri atas : kas dan bank, deposito, piutang, persediaan, belanja dibayar dimuka.

Aset tetap adalah Aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pelayanan publik dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi

Aset lain-lain adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, Investasi jangka panjang, Aset tetap dan dana cadangan.

3). Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dilunasi

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul

4). Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Kewajiban. Ekuitas terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan.

5). Kebijakan Akuntansi Hibah Terikat

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan untuk pembiayaan operasional tertentu misalnya Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan perolehan Aset tetap, misalnya pendonor menyumbangkan dana tetapi khusus untuk membeli Aset tertentu, maka dicatat pada Neraca Dana Hibah Terikat

7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan Aset dan atau penurunan Kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu

Pendapatan diakui pada saat kejadian (transaksi) bukan pada saat kas atau setara kas diterima dan dicatat dalam periode bersangkutan sebesar jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

Penerimaan berasal dari APBN dan APBD yang digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat diakui sebagai Pendapatan Jasa Layanan.

7). Kebijakan Akuntansi Biaya

Berdasarkan sumber dananya biaya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya yang sumber dananya dari pendapatan operasional rumah sakit dan biaya yang sumber dananya berasal dari alokasi dana pemerintah Kabupaten.

Biaya terdiri dari: biaya operasional dan biaya non operasional sedangkan biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan dan biaya administrasi dan umum



Oti Suharta, SKM, M.Kes
NIP. 19680542 196803 1 015

Sleman, 29 Februari 2016
Pejabat Keuangan

Sri Soehartati, SIP
NIP 19650108 199003 2 006

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1) Penjelasan atas pos-pos neraca;

(1) Aset

a. Kas dan setara kas;	Rp	150,130,71
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2015 terdiri dari:		
- Kas di Bendahara	Rp	1,707,42
- Kas di rekening Bank	Rp	148,423,296
- Kas/ Bank Bendahara APBD	Rp	
	Jumlah Rp	<u>150,130,717</u>
b. Investasi jangka pendek	Rp	
Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek berupa kas dan setara kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2015		
c. Piutang usaha;	Rp	368,000
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Usaha per 31 Desember 2015		
Piutang Jamkesmas November 2015	Rp	368,000
d. Piutang Lain	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2015 berupa		
e. Persediaan	Rp	45,677,747
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2015		
Persediaan ATK		1,255,800
Persediaan cetakan		13,398,600
Persediaan bahan laboratorium		500,000
Persediaan alat & bahan medis		0
Persediaan bahan & peralatan kebersihan		2,717,512
Persediaan alat listrik , eletronika , dll		990,000
Persediaan obat farmasi		26,815,835
	Jumlah Rp	<u>45,677,747</u>
f. Uang Muka	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Muka per 31 Desember 2015		
e. Biaya dibayar dimuka.	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan saldo Biaya dibayar di muka per 31 Desember 2015		
f. Aset tetap,	Rp	1,681,485,789
Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2015, terdiri atas :		
- Tanah;	Rp	
- Gedung dan bangunan;	Rp	1,091,994,950
- Peralatan dan mesin;	Rp	1,969,302,000
- Jalan, irigasi, dan jaringan;	Rp	31,791,666
- Aset tetap lainnya;	Rp	
- Konstruksi dalam pengerjaan.	Rp	
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	(1,411,602,827)
	Jumlah Rp	<u>1,681,485,789</u>
g. Aset lainnya	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2015, terdiri atas :		
- aset kerja sama operasi	Rp	0
- aset sewa guna usaha;	Rp	0
- aset tak berwujud;	Rp	0
- aset lain-lain.	Rp	0
	Jumlah Rp	<u>0</u>

(2) Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Rp 0

Jumlah tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015, terdiri atas :

- utang usaha;	Rp	0
- utang pajak;	Rp	0
- biaya yang masih harus dibayar;	Rp	0
- pendapatan diterima di muka	Rp	0
- bagian lancar utang jangka panjang;	Rp	0
- utang Bunga	Rp	0
- utang jangka pendek lainnya	Rp	0
- Uang persediaan dari APBD Kab / kota	Rp	0
Jumlah	Rp	0

Kewajiban Jangka Panjang Rp 0

Jumlah tersebut merupakan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015

(3) Ekuitas

Ekuitas BLUD diklasifikasikan menjadi:

a. Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas:

- ekuitas awal	Rp	1,543,878,209
- surplus & defisit tahun lalu;	Rp	109,850,914
- surplus & defisit tahun berjalan;	Rp	37,433,644
- ekuitas donasi;	Rp	402,280,639

b. Ekuitas Terikat

- Ekuitas Terikat Temporer	Rp	
- Ekuitas Terikat Permanen	Rp	
Jumlah	Rp	2,093,443,406

2) Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional;

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan terdiri dari :

a. Pendapatan

a) Pendapatan Usaha Jasa Layanan	Rp	1,179,806,900
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan Usaha dari Jasa Layanan per 31 Desember 2015 yang terdiri dari:		
- Pendapatan Paramedial Rawat Jalan	Rp	1,179,806,900
- Pendapatan Paramedial Rawat Inap	Rp	
- Pendapatan Paramedial Rawat Gawat Darurat	Rp	
- Pendapatan Kapitas Rawat Gawat Darurat	Rp	
Jumlah	Rp	1,179,806,900

b) Hibah terikat dan tidak terikat;	Rp	408,351,893
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan hibah per 31 Desember 2015		
Dropping obat		
Dropping alkes		

c) Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	26,029,295
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan Usaha Lainnya per 31 Desember 2015 yang terdiri dari:		
Pendapatan PKL	Rp	17,258,000
Pendapatan Bunga Bank	Rp	4,296,295
Pendapatan Lainnya	Rp	4,475,000
Jumlah	Rp	26,029,295

d) Pendapatan dari APBN/APBD	Rp	291,322,895
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan dari APBN/APBD per 31 Desember 2015		

b. Biaya

a) Biaya Pelayanan	Rp	1,106,860,848
Jumlah tersebut merupakan Biaya Pelayanan per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:		
- Biaya pegawai	Rp	149,717,000
Honorarium dokter	53,143,200	
Honorarium psikolog	30,128,800	
Honorarium fogging	5,600,000	
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	11,250,000	
Uang saku / transport PNS	49,595,000	
	<u>149,717,000</u>	
- Biaya bahan	Rp	500,801,109
BHP Medis	22,582,700	
Bahan dan obat-obatan	396,327,657	
Bahan dan alat laboratorium	54,186,352	
Bahan makanan pokok	980,000	
Bahan peralatan & perlengkapan	5,264,400	
Belanja tambahan makanan dan vitamin	21,460,000	
	<u>500,801,109</u>	
- Biaya Jasa Layanan	Rp	432,905,050
Biaya Jasa Pelayanan - PNS	381,254,600	
Biaya Jasa Pelayanan - non PNS	51,650,450	
	<u>432,905,050</u>	
- Biaya Pemeliharaan	Rp	14,300,000
Biaya pemeliharaan alat kedokteran	3,443,000	
Biaya pemeliharaan alat laboratorium	3,949,000	
Biaya uji kalibrasi	6,008,000	
Biaya pemeliharaan alat mesin fogging	900,000	
	<u>14,300,000</u>	
- Biaya Barang dan Jasa	Rp	9,137,689
Biaya perawatan dan pengobatan	575,000	
Biaya jasa uji pemeriksaan laboratorium luar	4,705,000	
Biaya barang inventaris peralatan kesehatan	3,857,689	
	<u>9,137,689</u>	
- Biaya Penyusutan/ Depresiasi	Rp	0
- Biaya Pelayanan Lainnya	Rp	0
	<u>Jumlah Rp</u>	<u>1,106,860,848</u>
b) Biaya Umum dan Administrasi	Rp	761,216,491
Jumlah tersebut merupakan biaya Umum dan Administrasi per 31 Desember 2015		
- biaya pegawai	Rp	106,051,900
Honorarium panitia pelaksana kegiatan	25,180,000	
Honorarium tim pengadaan barang & jasa	4,195,000	
Honorarium akuntan	18,881,850	
Honorarium IT dan pengelola aset	13,072,050	
Honorarium cleaning service	11,808,000	
Honorarium sopir	13,920,000	
Honorarium jaga malam	13,200,000	
Uang saku / transport PNS	1,820,000	
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	1,200,000	
Honorarium instruktur senam	2,775,000	
	<u>106,051,900</u>	

- biaya admin perkantoran;	Rp	256,821,200
Biaya alat tulis kantor	15,323,200	
Biaya cetak	19,398,400	
Biaya penggandaan (fotocopy)	19,349,200	
Biaya perangko , materai , benda pos lainnya	1,500,000	
Biaya makanan dan minuman harian pegawai	6,970,000	
Biaya makanan dan minuman rapat	92,956,500	
Biaya makanan dan minuman tamu	2,326,500	
Biaya perjalanan dinas dalam daerah	31,562,900	
Biaya kursus2 singkat / pelatihan	15,075,000	
Biaya bimbingan teknis	750,000	
Biaya makanan dan minuman lembur	7,684,500	
Biaya transportasi dan akomodasi	43,925,000	
	<u>256,821,200</u>	
- biaya pemeliharaan	Rp	47,197,776
Biaya pemeliharaan alat angkutan darat bermotor	6,907,776	
Biaya pemeliharaan peralatan kantor	240,000	
Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	400,000	
Biaya pemeliharaan meubelair	1,000,000	
Biaya pemeliharaan instalasi listrik & telepon	1,500,000	
Biaya pemeliharaan AC	6,400,000	
Biaya pemeliharaan alat-alat komunikasi	1,000,000	
Biaya pemeliharaan gedung - bangunan	21,150,000	
Biaya pemeliharaan komputer	6,600,000	
Biaya pemeliharaan - jaringan air	2,000,000	
	<u>47,197,776</u>	
- biaya barang dan jasa;	Rp	128,015,246
Biaya alat listrik dan elektronik	13,481,200	
Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9,197,607	
Biaya bahan bakar minyak	20,903,000	
Biaya tabung pemadam kebakaran	400,000	
Biaya telepon	4,261,364	
Biaya listrik	34,324,420	
Biaya kawat/faksimilie/internet	278,000	
Biaya surat kabar / majalah	780,000	
Biaya penghias ruangan	5,946,635	
Biaya uji laboratorium	1,398,500	
Biaya jasa keamanan	19,330,000	
Biaya cleaning service	10,788,000	
Biaya jasa uji - pemeriksaan limbah medis	5,498,520	
Biaya pengisian gas / galon	828,000	
Biaya jasa angkut sampah	600,000	
	<u>128,015,246</u>	
- biaya penyusutan - aktiva tetap	Rp	221,213,279
- biaya promosi	Rp	0
- biaya Depresiasi/Penyusutan	Rp	
- biaya Administrasi Lainnya	Rp	1,917,090
	<u>Rp</u>	<u>761,216,491</u>
Jumlah		

c) Pendapatan dan Biaya Non Operasional	Rp	0
Jumlah tersebut merupakan pendapatan dan biaya non operasional per 31 Desember 2015 terdiri atas		
- Pendapatan Non Operasional	Rp	0
- Biaya Non Operasional	Rp	0
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>0</u>

3) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;

Komponen-komponen pelaporan arus kas terdiri dari

(1). Arus kas dari aktivitas operasi, terdiri atas:

Arus kas masuk	Rp	1,497,159,090
Pendapatan Jasa Layanan	1,179,806,900	
Pendapatan APBD / APBN	291,322,895	
Pendapatan usaha lainnya	26,029,295	
Uang persediaan		
	<u>Rp</u>	<u>1,497,159,090</u>

Arus kas keluar	Rp	1,267,949,131
Biaya Pelayanan	718,368,082	
Biaya Administrasi dan Umum	549,581,049	
	<u>Rp</u>	<u>1,267,949,131</u>

Arus kas bersih Rp 229,209,959

(2). Arus kas dari aktivitas investasi, terdiri atas:

Arus kas masuk	Rp	0
Arus kas keluar	Rp	179,486,100
Perolehan aset tetap		

Arus kas bersih Rp -179,486,100

(3). Arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri atas:

Arus kas masuk	Rp	0
Arus kas keluar	Rp	0
Arus kas bersih	<u>Rp</u>	<u>0</u>

4) Informasi Tambahan

BLUD mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Sleman, 29 Februari 2016
Pejabat Keuangan



Sri Soehartati, SIP
NIP 19650108 199003 2 006

